

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: II
Rapat ke-	: 3
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pupuk Bersubsidi dengan: 1. Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional; 2. Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI); dan 3. Ketua Asosiasi Distributor Pupuk Indonesia (ADPI).
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 11 November 2020
Waktu	: 14.50 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.
Acara	: Masukan mengenai Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
Ketua Rapat	: Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem)
Sekretaris Rapat	: Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir	: A. 21 Anggota dari 27 Anggota Panja B. Hadir: 1. Ir. H. Winarno Tohir (Ketua Umum KTNA Nasional); 2. Sadar Subagyo (Sekjen HKTI); dan 3. Agung Wahyudi (Ketua ADPI).

I. PENDAHULUAN

RDPU Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pupuk Bersubsidi dengan Ketua Umum KTNA Nasional, Ketua Umum HKTI, dan Ketua Asosiasi Distributor Pupuk Indonesia, dalam rangka mendapatkan masukan mengenai tata kelola pupuk bersubsidi, dibuka pukul 14.50 WIB oleh Ketua Rapat, Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN

Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan masukan dari KTNA Nasional, HKTI, dan ADPI mengenai tata kelola pupuk bersubsidi dengan poin-poin pembahasan, antara lain:

- a. Meminta Pemerintah untuk merumuskan kembali kebutuhan pupuk bersubsidi dan mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi sesuai dengan usulan alokasi pupuk bersubsidi;
- b. Meminta Pemerintah untuk tidak sepenuhnya menjalankan Kartu Tani secara Nasional hingga seluruh sarana dan prasarana program Kartu Tani tersedia 100% serta memberikan alternatif solusi kepada petani yang belum memiliki Kartu Tani;
- c. Meminta Pemerintah untuk memperbaiki permasalahan pupuk sebagai elemen yang integral dalam *grand design* nasional pertanian;
- d. Meminta Pemerintah untuk menghitung secara cermat seluruh permasalahan yang bermula dari data pertanian, mulai dari data luas lahan pertanian, kebutuhan pupuk, dan lain-lain;
- e. Meminta Pemerintah untuk membuat payung hukum untuk data pertanian dalam UU amnesti data;
- f. Meminta Pemerintah untuk memperbaiki e-RDCK;
- g. Meminta Pemerintah untuk melibatkan asosiasi, polri, dan lain-lain di dalam satgas pupuk bersubsidi.

Selanjutnya, penjelasan dan masukan tersebut akan dilakukan kajian oleh Tenaga Ahli Komisi IV DPR RI dan digunakan sebagai bahan Komisi IV DPR RI dalam rapat-rapat dengan Kementerian dan sebagai pertimbangan dalam menyusun rekomendasi Panja.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.30 WIB.

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Achmad Agus Thomy
NIP. 196508171988031002

